Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Disahkan Jadi Perda



Senin, 29 Juni 2026

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dan seluruh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna IV pada Senin (29/6/2026).

Ketua DPRD, Samsul Hidayat, berharap pengesahan regulasi finansial ini menjadi landasan hukum kuat untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kerja sama antar-lembaga yang solid untuk merampungkan pembahasan anggaran tepat waktu, sehingga pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih baik, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Struktur keuangan daerah menunjukkan performa sehat dengan realisasi pendapatan sebesar Rp4.075.379.749.149,53. Sementara itu, pos belanja daerah berhasil ditekan hingga Rp4.022.567.100.740, menghasilkan surplus bersih sebesar Rp52.812.648.409,53. Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kini mencapai Rp303.367.940.984,90.

Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, menegaskan bahwa pengesahan Raperda APBD 2025 sangat berarti untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencermati catatan kritis dari badan pemeriksa legislatif untuk perbaikan tata kelola administrasi di unit kerja terkecil.

Komitmen terhadap transparansi penggunaan uang rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja sama yang harmonis menjadi modal berharga demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang maju dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita bersama yang terus dijaga.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.